RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN...

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

KAWASAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 2019tentang Perencanaan Ruang Laut dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Biak;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor... Tahun... tentang Perencanaan Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN BIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

5. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
8. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
9. AlurPelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
10. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
15. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
16. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
17. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
18. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk

melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSN Kawasan Biakmeliputi:

a. peran dan fungsi;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
c. rencana Struktur Ruang Laut;
d. rencana Pola Ruang Laut;
e. rencana pemanfaatan ruang laut;
f. pengendalian pemanfaatan ruang laut; dan
g. peran serta Masyarakat.

Pasal 3

(1) Batas RZ KSN Kawasan Biakmeliputi:
   a. sebelah selatan yaitu garis pantai Provinsi Papuadari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Waropen.

b. sebelahtimuryaitu garis pantai Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numpor, Kabupaten Kepulauan Yapen hingga Kabupaten Waropen.;
c. sebelah utara berupa perairan Samudera Pasifik; dan
d. sebelah barat yaitu wilayah perairan yang ditarik dari pesisir Nabire;

(2) Peta batas RZ KSN Kawasan Biaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 4

RZ KSN Kawasan Biakberperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Biak.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

RZ KSN Kawasan Biakberfungsi untuk:
a. penyelarasan rencana struktur ruang dengan rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayahperairan Kawasan Biak;

d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di wilayahperairan Kawasan Biak;
e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayahperairan Kawasan Biak; dan
f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan Kawasan Biak.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi KSN Kawasan Biak ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. kawasan yang dinamis berbasis ekonomi kelautan dan berdaya saing global terintegrasidanamanuntukmeningkatkanperekonomian ;
b. perlindungankeanekaragamanhayatilaut; dan
c. pengembanganwilayahberbasismasyarakatadat.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang dinamis berbasis ekonomi kelautan, berdaya saing globalterintegrasi dan aman untuk meningkatkan perekonomian kawasan Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. pengembanganpusatpertumbuhankelautandanperikanan
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut
c. sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritas
d. pengembangankawasanpertahanandankeamanan yang memilikikemampuandankinerjasecaraterpadu

(2) Strategi untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan untuk mendukung pelaksanaan pembangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan;
b. menjamin ketersediaan energi;
c. menjamin keberadaan Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital Nasional;
d. meningkatkan nilai tambah dan investasi perdagangan; dan
e. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam kawasan dan/atau zona.

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan ;
b. meningkatkan peran pelabuhan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan jaringan prasarana dan sarana laut;
c. menata dan meningkatkan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dengan memperhatikan pelaksanaan pelindungan lingkungan Laut;

d. merencanakandan menata jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut;
e. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan/atau perawatan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
f. mengalokasikan alur pelayaran yang aman dengan memperhatikan akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

(4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan sektor dan kawasan prioritassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. menyelaraskan, menyerasikandan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam kawasan, zonadan/atau sub zona di wilayah perairan;
b. menyelaraskan program, kegiatan, dan/atau pendanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas perairan pesisir dalam wilayah perairan Kawasan Biak; dan
c. meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya daya kelautan.

(5) Strategi untuk pengembangankawasanpertahanandankeamanan yang memilikikemampuandankinerjasecaraterpadusebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengalokasikansebagianwilayahperairanKawasan Biak untukmendukungfungsipertahanandankeamanan negara;
b. mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan melalui pengelolaan wilayah pertahanan secara efektif;
c. mengamankankeberadaanObyek Vital Nasional;
d. mengembangkanprasaranadansaranapertahanan dankeamanannegara; dan

e. mengembangkankegiatanpertahanandankeamana nsecaradinamis.

Pasal 8

(1) Kebijakan untuk melindungi keanekaragaman hayati lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal6huruf b meliputi:
   a. Melestarikan kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi
   b. Pengembangan teknik dan upaya rehabilitasi kawasan pesisir dan laut
   c. Pelestarian dan pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

(2) Strategi untuk melestarikan kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. mengembangkan dan mengelola kawasan perairan yang bernilai ekologis tinggi secara efektif melalui kemitraan Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha serta mengembangkan jejaring kawasan konservasi baik jejaring lokal, regional maupun global
   b. mengembangkan wilayah perairan yang merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia yang selaras serasi dengan memperhatikan kesejahteraan Masyarakat Adat
   c. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan
   d. mengalokasikan sebagian wilayah perairan Kawasan Biak sebagai kawasan konservasi; dan
   e. mengembangkan kegiatan pelindungan lingkungan laut.

(3) Strategi untuk untukmengembanganteknikdanupayarehabilitasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. identifikasi pemanfaatan wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan ekosistem; dan
b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir.
c. mengembangkan teknik dan upaya-upaya rehabilitasi pada kawasan konservasi perairan
d. melakukan upaya restorasi dan pemulihan kerusakan sumberdaya di kawasan perairan melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga non-pemerintah;

(4) Strategi untuk pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi:

a. Meningkatkanpengawasandanpengendalianpencemaran, kerusakandanpemanfaatansumberdayaKelautan di kawasan Biak
b. Meningkatkankapasitasaparaturdanmelibatkankelompok-kelompokmasyarakatdalampengawasan
c. Mengidentifikasidanmengendalikankegiatanpemanfaatanwilayahpesisirdanpulau-pulaukecil yang dapatmengakibatkankerusakanekosistem
d. MendayagunakanSumberDayaKelautansecaraberkelanjutan.

Pasal 9

(1) Kebijakan untuk pengembangan wilayah berbasis Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a. pengintegrasian wilayah Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan perencanaan KSN Biak

b. penjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomi;

(2) Strategi pengintegrasian wilayah Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan perencanaan KSN Biak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf a meliputi:

a. Mengembangkansistemperingatandinipadaperkampungannelayandan MasyarakatAdat yang rawanbencanaalam tsunami, pasangdangelombang.
b. Memberdayakanmasyarakatkampungadatdalampengelolaankawasankonservasiperairan.
c. Mengintegrasikanmasyarakatkampungadatdalampengembangankawasanperekonomianbaruberbasisperikanankelautan

(3) Strategipenjaminan kehidupan sosial budaya dan ekonomisebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b meliputi:

a. menyediakanruangpenghidupandanakseskepadaNelayan Kecil, NelayanTradisional, danPembudiDayaIkan Kecil;
b. meningkatkankesejahteraanekonominelayandanmasyarakatadat
c. meningkatkankualitassumberdayamanusiapelakuusahakelautandanperikanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Rencana Struktur RuangLautRZ KSN Kawasan Biakmeliputi :

a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 11

(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
   a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
   b. pusat industri kelautan.
(2) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya.
(3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupaSentra Industri Maritim.

Pasal 12

(1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi Kabupaten Biak, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Nabire.
(2) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)meliputiKabupaten Biak dan Kabupaten Nabire.

Pasal 13

Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 15

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

a. pelabuhan pengumpul; dan
b. pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 16

(1) Pelabuhan pengumpulsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
    a. Pelabuhan Biakdi Kabupaten Biak Numfor; dan
    b. Pelabuhan Nabiredi Kabupaten Nabire.
    c. Pelabuhan Dawai di Kabupaten Yapen;
    d. Pelabuhan Serui di Kabupaten Yapen.
(2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam 15 huruf c meliputi pelabuhan pengumpan regional.
(4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. PelabuhanPengumpanBotawaWaropen
    b. PelabuhanWaren di KabupatenWaropen
    c. PelabuhanPengumpanKoridoSupiori

(5) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan.
(2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar;

b. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
c. pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.

Pasal 18

Pelabuhan perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 19

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa PelabuhanPerikananWaropen.

Pasal 20

Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berupa PelabuhanPerikananFandoi Biak

Pasal 21

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20digambarkan dalam peta Struktur Ruang LautKawasan Biakdengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Rencana PolaRuang Laut RZ KSN Kawasan Biakmeliputi:

a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Biak; dan
b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

Bagian Kedua
Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting
danStrategis Nasional di Perairan Kawasan Biak

Pasal 23

Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di Perairan Kawasan Biakterdiri atas:
a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. Alur Laut.

Pasal 24

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
b. zona U2 yang merupakan zona permukiman;
c. zona U3 yang merupakan zona pelabuhan;
d. zona U4 yang merupakan zona pelabuhan perikanan;
e. zona U5 yang merupakan zona minyak dan gas bumi;
f. zona U11yang merupakanzona industri;
g. zona U12 yang merupakan zona bandara;
h. zona U14 yang merupakan zona energi;
i. zona U18yang merupakanzona pertahanan dan keamanan;

Pasal 25

Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa daerah pengembangan wisata di sebagian perairan sekitar Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire, Kabupaten

Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Supiori.

Pasal 26

Zona U2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf berupa kawasan permukiman yang berfungsi sebagai perlindungan kegiatan masyarakat hukum adat di sebagian kawasan perairan di Kabupaten Yapen dan sebagian perairan Kabupaten Supiori.

Pasal 27

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan area pengembangan pelabuhan :

a. Pelabuhan Utama, yaitu:
   1. Pelabuhan Biak; dan
   2. Pelabuhan Teluk Kimi Nabire.
b. Pelabuhan Pengumpul, yaitu :
   1. Pelabuhan Supiori
   2. Pelabuhan Botawa, Waropen

Pasal 28

(1) ZonaU4sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf dberupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan industri yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
(2) Zona U4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan disebagian perairan sekitar Kabupaten Biak.

Pasal 29

Zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan area pendukung operasional dan terminasi tambang minyak dan gas bumi di sebagian perairan Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire.

Pasal 30

Zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf fberupa area pendukungKawasan Industridi sebagian perairan sekitar Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Supiori.

Pasal 31

Zona U12sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf gberupa daerah area pengembangan bandar udara disebagian perairan Kabupaten Nabire.

Pasal 32

Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h berupa wilayah pendukung operasional pengembangan energi di sebagian kawasan perairan Kabupaten Biak.

Pasal 33

Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf iberupa area pengembangan Pangkalan Komando Armada Timur TNI AL di perairan sekitar Kabupaten Biak

Pasal 34

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Taman Wisata Perairan Padaido di sebagian perairan Kabupaten Biak yang selanjutnya disebut dengan zona C1.

Pasal 35

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf cterdiri atas:

a. alurT1 yang merupakan Alur Pelayaran;
b. alurT2 yang merupakan alur pipa bawah laut; dan
c. alurT3 yang merupakan alur kabel bawah laut.

Pasal 36

(1) Alur T1sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf aterdiri atas:

a. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Umum dan Perlintasan di Alur Pelayaran Biak;dan
b. Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Biakdengan pelabuhan lainnya.

(2) Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf b berupa merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sekitarKabupaten Biak, KabupatenNabire, danKabupatenSupiori.

(3) Alur T3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
a. alur T3.1 yang merupakan alur Kabel Listrik Laut di sebagian perairan Biak;
b. alur T3.2 yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi disebagian perairan Biak.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 37

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Biak.

Pasal 38

(1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34meliputi:
a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;dan
b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.

(2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. G1;
b. G2;dan
c. G3.

(3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa G5.

Pasal 39

(1) G1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Yapen.

(2) G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, mangrove, dan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Biak dan Kabupaten Nabire.

(3) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Nabire.

(4) G5sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (3) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di sebagian perairan sekitar Kabupaten Biak dan Kabupaten Nabire.

Pasal 40

(1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 39 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Rincian luas beserta daftar koordinat pola ruang untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22sampai dengan Pasal 34tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 41

(1) Rencana pemanfaatan ruang lautmerupakan upaya perwujudan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut padaRZ KSN Kawasan Biakyang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. program utama;
   b. lokasi program;
   c. sumber pendanaan;
   d. pelaksana program; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 42

Program utama dan lokasi programsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Biak dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan

b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Biak dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 43

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4**1**ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) huruf dterdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

Pasal 45

(1) Waktu pelaksanaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) huruf edisusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4(empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Biakyang meliputi:
    a. tahap kedua pada periode 2020–2024;
    b. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
    c. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
    d. tahap kelima pada periode 2035–2039.

Pasal 46

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruanglautdi Kawasan Biaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGLAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di Kawasan Biak.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang lautterdiri dari:
   a. Peraturan Pemanfaatan RuangLaut;
   b. perizinan;
   c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan RuangLaut

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

(1) Peraturan Pemanfatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan kawasan, zona, atau Alut Laut.

(2) Peraturan pemanfaatan ruang lautsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautpada Struktur Ruang Laut;
   b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautpada Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Biak; dan
   c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut padaarahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntuk
Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautpada Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruanglautuntuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
   2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;

3. pemanfaatan ruang Laut di sentra kegiatan Pergaraman yang mendukung pencapaian standar kualitas air Laut, penyediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha Pergaraman, dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; dan
4. pemanfaatan ruang Laut di Sentra Industri Maritim yang mendukung pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan maritim;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan;
   2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan; dan/atau
   3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan.

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;

2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
6. pelaksanaan hak lintas damai;
7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana Laut.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruangpada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan Biak

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2)huruf b terdiri atas:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52huruf a terdiri atas:

a. PeraturanPemanfaatan Ruang Lautuntukzona U1
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona U2
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntukzona U3
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Lautuntukzona U4
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untukzona U5
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang LautuntukZona U11
g. Peraturan Pemanfaatan Ruang LautuntukZona U12
h. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona U14
i. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Zona U18

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan/atau
2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan kelompok pancing (*Hook and Lines*).

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. perikanan budidaya;
   2. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkunganlaut;
   3. penangkapanikandenganmenggunakanalat penangkapan ikan danalat bantu penangkapanikanyang bersifat statisdanpasif;dan/atau
   4. pembuangan sampah dan limbah

c. kegiatan yang bolehdilakukansetelahmendapatkanizinsebagaimanadi maksuddalam zona U1meliputipenelitiandanpendidikan;dan
d. ketentuankhusus di zona U1meliputipenyediaantimkeamanandanpenyelamatanwisatawan.

Pasal 55

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk zona U2sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53huruf bterdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan dan kelautan;
   3. pembudidayaan ikan; dan
   4. wisata bahari.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. permukimandengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan, kerawanan terhadap bencana.
   2. monitoring dan evaluasi; dan
   3. pembangunan bangunan pengamanan pantai.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mencemari lingkungan;
   2. kegiatan yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
   3. kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, permukiman, pariwisata, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayatidan ekosistemnya; dan
   4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi U2.

Pasal 56

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk untuk zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53huruf cmeliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
   3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
   4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
   5. penyediaan perairan tempat labuh;
   6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
   7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
   8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
   9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
   10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
   11. pengalokasian ruang perairan pandu;

12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
13. operasional pelabuhan;
14. penunjang operasional pelabuhan;
15. pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan;
16. pertahanan dan keamanan negara; dan
17. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
2. Wisata Bahari;
3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
4. penggelaran dan/atau pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;
5. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan;dan
6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkanmeliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
2. pembangunan sampah dan limbah; dan/atau
3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk untuk zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;

4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
6. pengembangan pelabuhan perikanan jangka panjang;
7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
9. pengalokasian ruang perairan untuk tempat labuh jangkar;
10. pengalokasian ruang perairan pandu;
11. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan; dan
4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi yang memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   3. pemasangan dan/atau penempatan pipa bawah laut yang mendukung kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
b. kegiatan kegiatan yang diperbolehkan meliputi monitoring dan evaluasi;
c. kegiatan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
   2. pembudidayaan ikan;
   3. Wisata Bahari; dan
   4. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
   3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
   4. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai; dan
   5. penyediaan tempat untuk aktivitas ekonomi masyarakat lokal;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. reklamasi, dengan ketentuan:
   a) penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem dan memberikan ruang penghidupan nelayan kecildan pembudi daya ikan kecil;
   b) penetapan lebar kanal vertikal dan horizontal pulau hasil reklamasi tidak boleh kurang dari 400 (empat ratus) meter; dan
   c) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, ekosistem pesisir, dan pola evolusi garis pantai;
2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
3. pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona U11;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. industri yang mencemari lingkungan;
   2. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
   3. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
   4. membangun struktur keras di kanal baik vertikal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dengan daratan pesisir untuk menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan transpor sedimen; dan
   5. kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan industri.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untukzona U12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pelaksanaan kegiatan kebandarudaraan;
   3. pengamanan terhadap ruang udara untuk penerbangan yang berupa ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
   4. pelaksanaan operasional kebandarudaraan;
   5. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
   6. penunjang keselamatan operasi penerbangan;
   7. pelayanan kepabeanan;
   8. pelaksanaan karantina, imigrasi, dan keamanan;
   9. penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
   10. pertahanan dan keamanan negara;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan perairan dan ruang udara di sekitar zona U12 yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan
   2. pengembangan bandar udara dengan reklamasi dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan kerawanan terhadap bencana;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi kebandarudaraan; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi zona U12

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penelitian dan/atau pendidikan; dan
2. pemanfaatan energi listrik tenaga uap yang memperhatikan kelestarian lingkungan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
2. monitoring dan evaluasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
2. pembudidayaan ikan;
3. Wisata Bahari;
4. permukiman;
5. perdagangan dan jasa; dan
6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona U14

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i meliputi:

a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
1. kegiatan militer;
2. latihan militer;
3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
4. penempatan ranjau;
5. pembersihan ranjau;
6. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi zona U18; dan
7. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
2. pemanfaatan wilayah perairan diluar fungsi keamanan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 63

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa peraturan pemanfaatan ruang laut untukzona C3 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. perlindunganekosistempesisirdanlaut yang unikdan/ataurentanterhadapperubahan;
   3. perlindungan habitat danpopulasiikan, sertaalurmigrasi biota laut;
   4. perlindunganvegetasipantai;
   5. penangkapanikanskalakecildenganalatpenangkapanikanaktif;
   6. perikananbudidayaskalakecil;
   7. pariwisatadanrekreasi yang diperbolehkansesuaizonasikawasankonservasi; danatau
   8. rehabilitasi mangrove, terumbukarang, danlamun;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal nelayan
   2. monitoring danevaluasi; dan/atau
   3. pariwisatadanrekreasi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
   2. penangkapanikan yang menggunakanbahanpeledak,

biusdanataubahanberacun, sertamenggunakanalattangkap yang bersifatmerusakekosistem di wilayahpesisirdanpulau-pulaukecil;

3. semuajeniskegiatanpertambangan;
4. melakukankegiatanmenambangterumbukarang, mengambilterumbukarang; dan
5. pembuangansampahdanlimbah.

Pasal 64

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Alur Lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52huruf cmeliputi:

a. peraturan pemanfaatan ruang laut untukalur T1;
b. peraturan pemanfaatan ruang laut untukalur T2; dan
c. peraturan pemanfaatan ruang laut untukalur T3.

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
    3. pengerukan Alur Pelayaran;
    4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
    5. penetapan system rute kapal (*ship routering system)*;
    6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan
    8. pelaksanaan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal nelayan
2. pemasanganpipadan/ataukabelbawahlaut;
3. pembinaandanpengawasan;
4. kegiatanlainnya yang tidakmenguranginilaidan/ataufungsialur T1;dan
5. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T1;
   2. kegiatanusahapertambangan;
   3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
   4. pembudidayaan ikan;
   5. pembuangan sampah dan limbah; dan
   6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf bdanalur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T2 danalurT3;
   3. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
   4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan

5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T2 dan alur T3;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Wisata Bahari;
   2. pembudidayaan ikan;
   3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;
   4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut;
   5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut; dan
   6. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pertambangan mineral;
   2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
   3. labuh jangkar;
   4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
   5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi alur T2 dan alur T3.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 67

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di perairan Kawasan Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 68

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Biak;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Biak agar sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Biak; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Biak yang sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Biak.

Paragraf 2
Pemberian Insentif

Pasal 70

(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
   a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
   b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 71

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
a. penyediaanprasaranadansarana;
b. penghargaan; dan
c. publikasiataupromosi.

Pasal 72

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
   a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
   b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
   c. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Pemberian Disinsentif

Pasal 73

(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.

(3) Pemberian disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 74

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 75

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

a. perencanaan zonasi Kawasan Biak;
b. pemanfaatan ruang laut; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 76

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75huruf a berupa:

a. memberikan masukan dalam:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasiKSN Kawasan Biak;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana zonasiKSN Kawasan Biak; dan/atau
    5. penetapan rencana zonasiKSN Kawasan Biak.
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Biak.

Pasal 77

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Biak dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Biak;
    b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau

c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 78

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan Laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75huruf c berupa:

a. masukan terkait pelaksanaan peraturan pemanfaatan ruang laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasiKSN Kawasan Biakyang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasiKSN KawasanBiak.

Pasal 80

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75sampai dengan Pasal 79 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

(1) Rencana ZonasiKSN Kawasan Biakberlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak pengundangan Peraturan Presiden ini.
(2) Peninjauan kembali rencana zonasiKSN Kawasan Biak dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasiKSN Kawasan Biak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

PadasaatPeraturanPresideninimulaiberlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K dan rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangantentang rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 84

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal…

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIAK

PETA WILAYAH PERENCANAAN

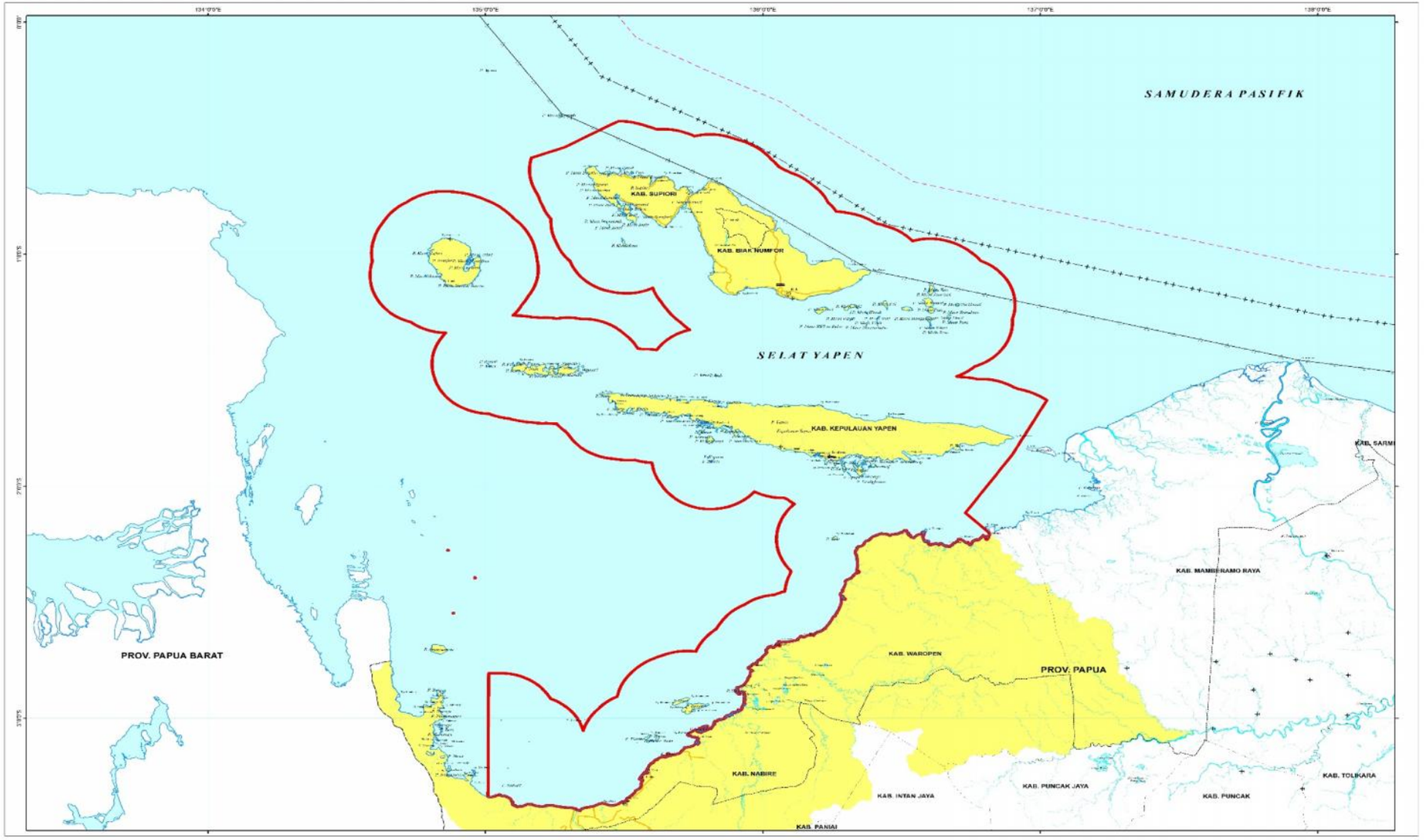

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIAK

PETA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

INFORMASI UMUM

ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

PERHUBUNGAN
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Terminal
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

STRUKTUR RUANG LAUT

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya

TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul

TATANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan

ALUR LAUT

ALUR PELAYARAN
- Alur Masuk Pelayaran

KABEL BAWAH LAUT
- Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

Keterangan Peta
1. Sistem Grid Geografis
2. Datum Horizontal WGS 1984
3. Kedalaman informasi pada peta ini berskala 1:50.000 tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Biak
4. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
5. Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

Sumber Peta
1. Data Garis Pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut No. 187 Skala 1 : 50.000, Tahun 1981; No. 363 Skala 1 : 1.000.000, Tahun 1990; No. 212 Skala 1 : 100.000, Tahun 1992; No. 151 Skala 1 : 2.000.000 Tahun 2003; No. 214 Skala1 : 500.000, Tahun 2005; No. 187 Skala 1 : 500.000 Tahun 2006
3. Data Lingkungan Pantaii Indonesia, Badan Informasi Geospasial,Tahun 2013
4. - Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial,

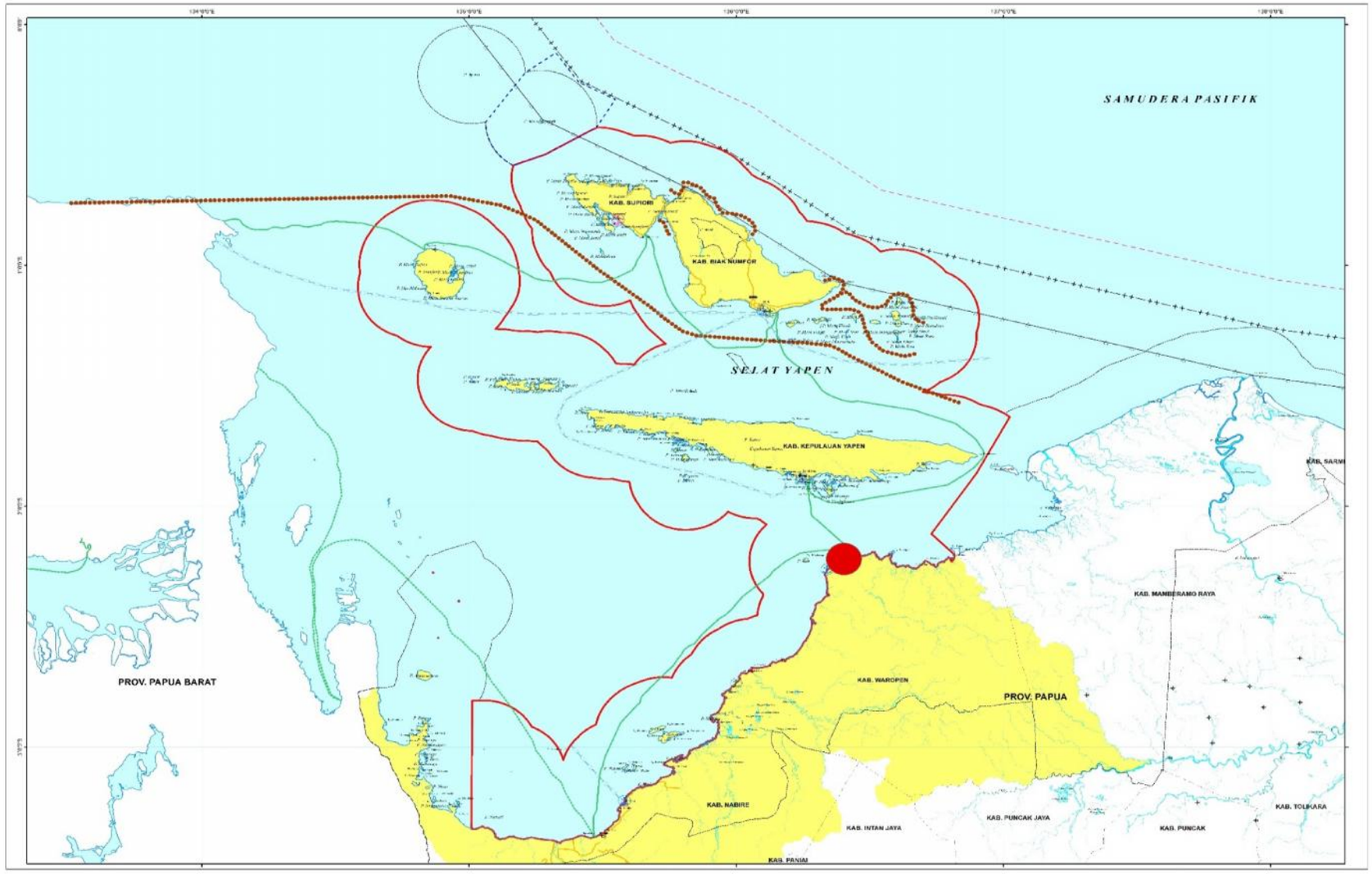

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN BIAK

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

INFORMASI UMUM

ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

PERHUBUNGAN
- Bandar Udara
- Pelabuhan
- Terminal
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor

PERAIRAN
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- U1 Zona Pariwisata
- U2 Zona Permukiman
- U3 Zona Pelabuhan
- U4 Zona Pelabuhan Perikanan
- U5 Zona Minyak dan Gas Bumi (Proses Terminasi)
- U11 Zona Industri
- U12 Zona Bandara
- U14 Zona Energi
- U18 Zona Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN KONSERVASI
- C1 Taman Wisata Perairan

Alur Laut
- T1 Alur Pelayaran
- T3.2 Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

RENCANA POLA RUANG LAUT

Arahan Alokasi Ruang

Kode	Arahan Pemanfaatan Ruang
G1	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan
G2	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan
G3	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi
G5	Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayat

Keterangan Peta

1. Sistem Grid Geografis
2. Datum Horizontal WGS 1984
3. Kedalamaninformasipadapetainiberskala 1:50.000 tetapipetainidicetakberskala format sebagailampirandariPeraturanPresidententangRencanaZonasiKawasanStrategis Nasional KawasanBiak
4. Peta inibersifatindikatifdantidakdapatdigunakanuntuktelaahmikro
5. Peta inibukanreferensiresmimengenaigaris-

Sumber Peta

1. Data GarisPantai, Batas Administrasi, danToponimidiperolehdari Data Digital KebijakanSatu Peta (KSP) 2018
2. Peta PusatHidro-OseanografiAngkatanLaut No. 187 Skala 1 : 50.000, Tahun 1981; No. 363 Skala 1 : 1.000.000, Tahun 1990; No. 212 Skala 1 : 100.000, Tahun 1992; No. 151 Skala 1 : 2.000.000 Tahun 2003; No. 214 Skala1 : 500.000, Tahun 2005; No. 187 Skala 1 : 500.000 Tahun 2006
3. Data LingkunganPantaii Indonesia, BadanInformasiGeospasial,Tahun 2013
4. Peta Negara KesatuanRepublik Indonesia, BadanInformasiGeospasial

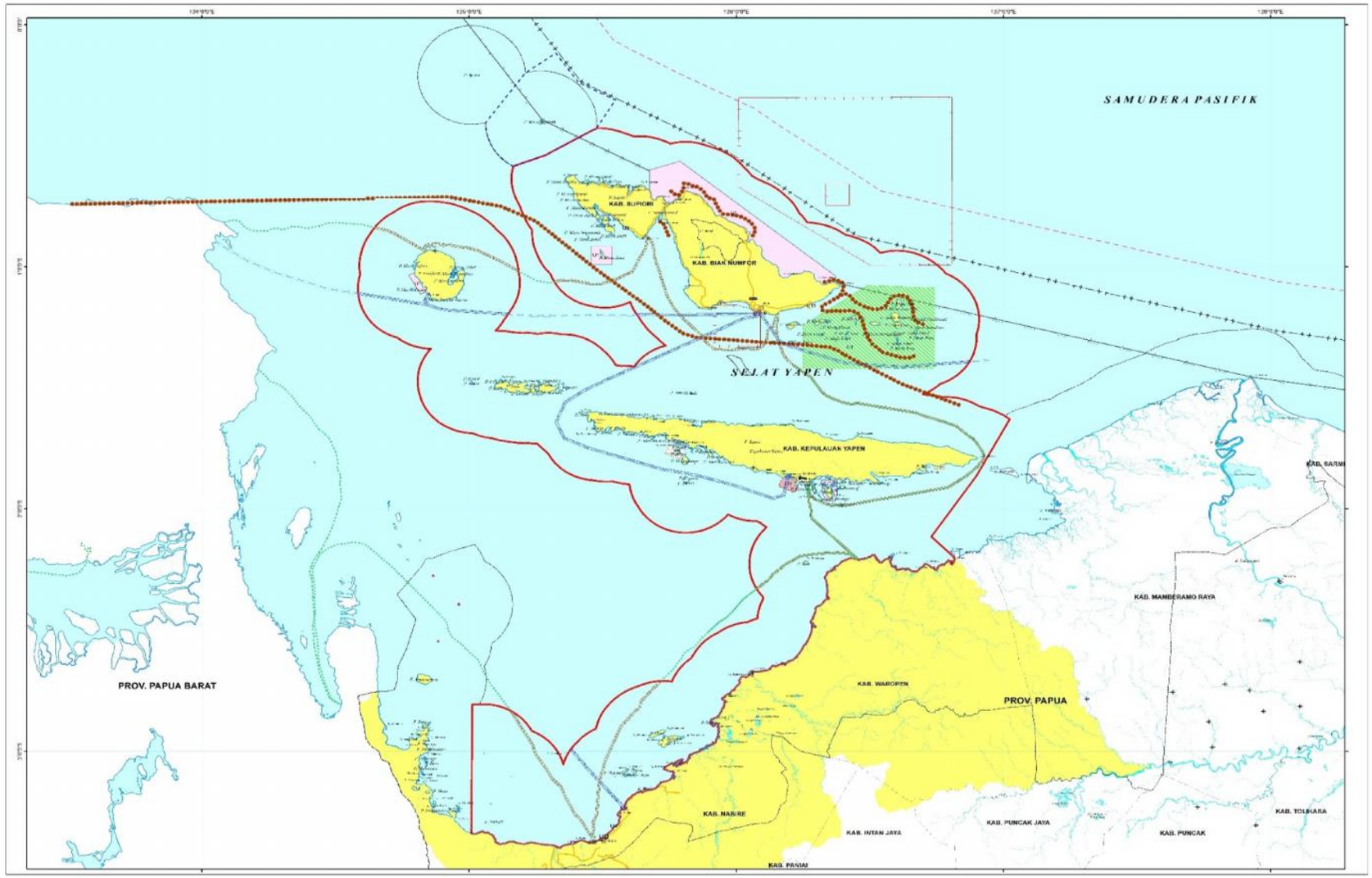

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN BIAK

RINCIAN LUAS KAWASAN DAN ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRANKAWASAN STRATEGIS NASIONAL BIAK

No	Kawasan	Zona	Notasi	Luas (Ha)
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	104281.98
		Zona Industri	U11	1744.92
		Zona Bandara	U12	178.94
		Zona Energi	U14	20.16
		Zona Pelabuhan	U2	4425.44
		Zona Pelabuhan Perikanan	U3	208.28
		Zona Permukiman	U4	4558.62
2	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	177439.57
3	Alur Laut	Alur Pelayaran	T1	46431.60
		Kabel Bawah Laut	T3	21953.83

DAFTAR KOORDINAT ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRANKAWASANSTRATEGIS NASIONAL BIAK

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
1.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	54	56.722	LS	135	32	11.617	BT
2.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	59	24.411	LS	135	32	11.617	BT
3.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	59	24.411	LS	135	27	28.937	BT
4.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	54	57.742	LS	135	27	28.937	BT
5.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	54	56.722	LS	135	32	11.617	BT
6.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	33	51.404	LS	135	47	20.565	BT
7.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	2	25.225	LS	136	22	26.112	BT
8.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	3	58.02	LS	136	20	49.627	BT
9.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	41	4.15	LS	135	40	29.964	BT
10.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	41	4.932	LS	135	40	33.311	BT
11.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	36	1.608	LS	135	40	32.821	BT
12.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	0	33	51.404	LS	135	47	20.565	BT
13.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	8	56.447	LS	135	57	35.506	BT
14.	Kawasan Pemanfaatan	Zona Industri	U11	1	9	39.566	LS	135	57	35.506	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Umum										
15.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	9	39.155	LS	135	55	51.685	BT
16.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	9	17.748	LS	135	55	51.607	BT
17.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	8	56.447	LS	135	57	35.506	BT
18.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	11	12.419	LS	136	5	0.917	BT
19.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	11	19.536	LS	136	4	55.865	BT
20.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	11	13.776	LS	136	4	46.421	BT
21.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	11	7.224	LS	136	4	50.653	BT
22.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	11	12.419	LS	136	5	0.917	BT
23.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	8	56.816	LS	136	17	20.506	BT
24.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	9	48.046	LS	136	17	42.754	BT
25.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	10	29.505	LS	136	16	16.237	BT
26.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	9	35.989	LS	136	15	50.807	BT
27.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	48	52.944	LS	136	46	49.371	BT
28.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	50	12.299	LS	136	46	49.026	BT
29.	Kawasan Pemanfaatan	Zona Industri	U11	1	50	11.764	LS	136	44	19.12	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Umum										
30.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	49	14.924	LS	136	44	17.983	BT
31.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	48	52.944	LS	136	46	49.371	BT
32.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Industri	U11	1	8	56.816	LS	136	17	20.506	BT
33.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	1	27.64	LS	134	47	41.09	BT
34.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	6	19.969	LS	134	50	10.107	BT
35.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	6	46.364	LS	134	49	4.728	BT
36.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	2	7.231	LS	134	46	26.108	BT
37.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	52	53.234	LS	136	21	41.721	BT
38.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	53	21.609	LS	136	22	44.36	BT
39.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	56	26.315	LS	136	22	38.471	BT
40.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	58	8.037	LS	136	22	6.348	BT
41.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	58	7.501	LS	136	20	36.94	BT
42.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	56	37.558	LS	136	19	26.27	BT
43.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	U1	1	52	52.27	LS	136	19	8.471	BT
44.	Kawasan Pemanfaatan	Zona Pariwisata	U1	1	52	53.234	LS	136	21	41.721	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Umum										
45.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	37.072	LS	135	23	38.733	BT
46.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	51.96	LS	135	22	53.45	BT
47.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	19.593	LS	135	22	44.634	BT
48.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	8.195	LS	135	23	29.682	BT
49.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	37.072	LS	135	23	38.733	BT
50.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	35.152	LS	135	27	24.051	BT
51.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	15.783	LS	135	27	18.364	BT
52.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	11.885	LS	135	27	33.911	BT
53.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Bandara	U12	3	22	31.763	LS	135	27	40.025	BT
54.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	2	14	41.766	LS	136	21	54.058	BT
55.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	2	15	20.142	LS	136	21	32.936	BT
56.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	2	14	41.546	LS	136	21	33.3	BT
57.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	54	34.193	LS	136	13	45.437	BT
58.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	55	59.405	LS	136	13	4.973	BT
59.	Kawasan Pemanfaatan	Zona Pelabuhan	U3	1	54	27.106	LS	136	9	30.608	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Umum										
60.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	52	27.926	LS	136	10	19.65	BT
61.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	54	34.193	LS	136	13	45.437	BT
62.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	2	14	41.766	LS	136	21	54.058	BT
63.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	3	14	1.766	LS	135	34	25.136	BT
64.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	3	13	40.964	LS	135	34	25.261	BT
65.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	3	13	41.254	LS	135	34	50.592	BT
66.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	11	49.003	LS	136	3	41.252	BT
67.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	10	54.642	LS	136	3	58.036	BT
68.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	11	4.82	LS	136	4	46.807	BT
69.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	11	24.198	LS	136	4	42.686	BT
70.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	11	39.094	LS	136	5	35.975	BT
71.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	12	16.889	LS	136	5	29.199	BT
72.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	12	4.136	LS	136	4	35.512	BT
73.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	1	11	49.003	LS	136	3	41.252	BT
74.	Kawasan Pemanfaatan	Zona Pelabuhan	U3	0	50	23.637	LS	135	35	29.676	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Umum										
75.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	0	50	39.371	LS	135	35	21.331	BT
76.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	0	50	23.631	LS	135	34	54.67	BT
77.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	0	50	9.244	LS	135	35	3.433	BT
78.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	U3	0	50	23.637	LS	135	35	29.676	BT
79.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	2	40	53.281	LS	136	2	55.594	BT
80.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	2	40	10.307	LS	136	2	55.666	BT
81.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	2	40	10.25	LS	136	3	21.51	BT
82.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	2	40	53.281	LS	136	2	55.594	BT
83.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	3	18	48.384	LS	135	32	22.974	BT
84.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	3	18	25.924	LS	135	32	6.167	BT
85.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	3	18	11.897	LS	135	32	30.259	BT
86.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan Perikanan	U4	3	18	32.929	LS	135	32	47.391	BT
87.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Permukiman	U2	1	44	5.277	LS	135	49	16.271	BT
88.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Permukiman	U2	1	47	52.185	LS	135	47	19.157	BT
89.	Kawasan Pemanfaatan	Zona Permukiman	U2	1	46	18.313	LS	135	43	56.631	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
	Umum										
90.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Permukiman	U2	1	43	22.89	LS	135	45	26.73	BT
91.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Permukiman	U2	1	44	5.277	LS	135	49	16.271	BT
92.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pengolahan Energi	U14	3	20	58.632	LS	135	30	29.5	BT
93.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pengolahan Energi	U14	3	21	11.495	LS	135	30	23.116	BT
94.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pengolahan Energi	U14	3	21	11.514	LS	135	30	23.101	BT
95.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pengolahan Energi	U14	3	21	3.699	LS	135	30	9.549	BT
96.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pengolahan Energi	U14	3	20	51.792	LS	135	30	17.087	BT
97.	Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pengolahan Energi	U14	3	20	58.632	LS	135	30	29.5	BT
98.	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	1	5	16	LS	136	44	32	BT
99.	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	1	25	21	LS	136	44	34	BT
100.	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	1	25	21	LS	136	15	3	BT
101.	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	1	14	32	LS	136	15	1	BT
102.	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	1	4	38.148	LS	136	29	27.007	BT
103.	Kawasan Konservasi	Taman Wisata Perairan	C1	1	5	16	LS	136	44	32	BT
104.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T1	3	12	50.089	LS	135	33	32.017	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
105.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T2	3	9	57.345	LS	135	31	4.555	BT
106.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T3	3	4	56.956	LS	135	26	47.26	BT
107.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T4	3	4	56.832	LS	135	26	47.155	BT
108.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T5	3	4	56.38	LS	135	26	46.789	BT
109.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T6	2	59	41.614	LS	135	22	41.302	BT
110.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T7	2	59	13.929	LS	135	22	59.968	BT
111.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T8	3	4	35.99	LS	135	27	12.054	BT
112.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T9	3	9	36.105	LS	135	31	29.117	BT
113.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T10	3	9	36.127	LS	135	31	29.135	BT
114.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T11	3	12	29.464	LS	135	33	57.105	BT
115.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T12	3	13	41.314	LS	135	34	47.663	BT
116.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T13	3	14	2.049	LS	135	34	22.563	BT
117.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T14	3	12	50.089	LS	135	33	32.017	BT
118.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T15	1	56	20.679	LS	136	10	25.764	BT
119.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T16	1	52	26.406	LS	136	11	15.413	BT
120.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T17	1	51	59.549	LS	136	11	42.009	BT
121.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T18	1	52	7.064	LS	136	11	49.218	BT
122.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T19	1	56	43.27	LS	136	10	52.277	BT
123.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T20	1	57	41.114	LS	136	8	12.186	BT
124.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T21	1	54	13.876	LS	135	58	48.078	BT
125.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T22	1	51	58.777	LS	135	51	6.828	BT
126.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T23	1	50	22.202	LS	135	42	52.968	BT
127.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T24	1	50	22.07	LS	135	42	52.358	BT
128.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T25	1	50	21.915	LS	135	42	51.753	BT
129.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T26	1	50	21.736	LS	135	42	51.155	BT
130.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T27	1	45	11.836	LS	135	26	41.237	BT
131.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T28	1	45	11.65	LS	135	26	40.689	BT
132.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T29	1	45	11.445	LS	135	26	40.149	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
133.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T30	1	45	11.221	LS	135	26	39.616	BT
134.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T31	1	42	44.694	LS	135	21	12.595	BT
135.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T32	1	38	33.259	LS	135	19	17.422	BT
136.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T33	1	33	29.427	LS	135	21	21.06	BT
137.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T34	1	30	34.124	LS	135	25	32.534	BT
138.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T35	1	25	7.245	LS	135	36	14.735	BT
139.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T36	1	16	39.471	LS	135	53	16.747	BT
140.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T37	1	16	39.344	LS	135	53	17.006	BT
141.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T38	1	13	46.196	LS	135	59	13.269	BT
142.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T39	1	12	43.286	LS	136	1	17.972	BT
143.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T40	1	12	29.365	LS	136	2	2.153	BT
144.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T41	1	12	6.066	LS	136	4	3.812	BT
145.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T42	1	12	1.652	LS	136	4	29.617	BT
146.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T43	1	11	59.815	LS	136	4	38.009	BT
147.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T44	1	12	12.184	LS	135	37	53.456	BT
148.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T45	1	11	39.782	LS	135	37	31.621	BT
149.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T46	1	11	27.278	LS	136	4	34.462	BT
150.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T47	1	11	2.598	LS	136	4	23.695	BT
151.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T48	1	11	17.317	LS	136	5	19.965	BT
152.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T49	1	11	17.451	LS	136	5	20.098	BT
153.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T50	1	11	34.908	LS	136	5	27.762	BT
154.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T51	1	11	34.981	LS	136	5	27.77	BT
155.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T52	1	11	51.876	LS	136	5	51.899	BT
156.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T53	1	15	43.83	LS	136	8	20.962	BT
157.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T54	1	17	38.713	LS	136	9	34.481	BT
158.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T55	1	18	18.092	LS	136	9	59.968	BT
159.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T56	1	18	28.465	LS	136	10	14.494	BT
160.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T57	1	18	51.024	LS	136	10	48.934	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
161.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T58	1	19	38.38	LS	136	12	37.033	BT
162.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T59	1	23	17.891	LS	136	23	33.28	BT
163.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T60	1	23	37.266	LS	136	24	50.805	BT
164.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T61	1	23	53.162	LS	136	27	1.677	BT
165.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T62	1	24	36.287	LS	136	36	53.269	BT
166.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T63	1	23	14.205	LS	136	52	33.331	BT
167.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T64	1	23	14.502	LS	136	52	33.174	BT
168.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T65	1	23	48.511	LS	136	52	14.023	BT
169.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T66	1	23	48.57	LS	136	52	13.987	BT
170.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T67	1	25	8.895	LS	136	36	53.558	BT
171.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T68	1	24	25.609	LS	136	26	58.954	BT
172.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T69	1	24	25.554	LS	136	26	58.356	BT
173.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T70	1	24	25.534	LS	136	26	58.185	BT
174.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T71	1	24	9.471	LS	136	24	45.937	BT
175.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T72	1	24	9.404	LS	136	24	45.443	BT
176.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T73	1	24	9.321	LS	136	24	44.951	BT
177.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T74	1	24	9.222	LS	136	24	44.462	BT
178.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T75	1	24	9.109	LS	136	24	43.977	BT
179.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T76	1	23	49.34	LS	136	23	24.875	BT
180.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T77	1	23	49.176	LS	136	23	24.27	BT
181.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T78	1	23	48.989	LS	136	23	23.673	BT
182.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T79	1	20	8.716	LS	136	12	25.232	BT
183.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T80	1	19	19.928	LS	136	10	33.918	BT
184.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T81	1	18	55.58	LS	136	9	56.575	BT
185.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T82	1	18	55.464	LS	136	9	56.4	BT
186.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T83	1	18	55.212	LS	136	9	56.037	BT
187.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T84	1	18	40.566	LS	136	9	36.158	BT
188.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T85	1	17	56.452	LS	136	9	7.349	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
189.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T86	1	17	56.382	LS	136	9	7.304	BT
190.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T87	1	16	1.47	LS	136	7	53.767	BT
191.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T88	1	12	15.149	LS	136	5	28.811	BT
192.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T89	1	12	8.186	LS	136	5	18.696	BT
193.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T90	1	12	12.344	LS	136	5	16.055	BT
194.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T91	1	12	19.727	LS	136	5	9.754	BT
195.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T92	1	12	26.043	LS	136	5	0.441	BT
196.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T93	1	12	30.92	LS	136	4	47.926	BT
197.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T94	1	12	33.694	LS	136	4	35.403	BT
198.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T95	1	12	38.173	LS	136	4	9.216	BT
199.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T96	1	12	38.179	LS	136	4	9.184	BT
200.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T97	1	13	0.839	LS	136	2	10.526	BT
201.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T98	1	13	13.531	LS	136	1	30.079	BT
202.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T99	1	14	15.243	LS	135	59	27.898	BT
203.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T100	1	14	15.341	LS	135	59	27.704	BT
204.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T101	1	17	8.686	LS	135	53	31.045	BT
205.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T102	1	25	36.506	LS	135	36	28.943	BT
206.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T103	1	25	36.544	LS	135	36	28.865	BT
207.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T104	1	31	1.484	LS	135	25	50.117	BT
208.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T105	1	33	50.582	LS	135	21	46.573	BT
209.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T106	1	38	32.536	LS	135	19	51.262	BT
210.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T107	1	42	21.764	LS	135	21	37.071	BT
211.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T108	1	44	41.055	LS	135	26	51.85	BT
212.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T109	1	49	50.413	LS	135	43	0.064	BT
213.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T110	1	51	27.053	LS	135	51	14.21	BT
214.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T111	1	53	42.93	LS	135	58	58.187	BT
215.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T112	1	57	7.541	LS	136	8	12.154	BT
216.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T113	1	56	20.679	LS	136	10	25.764	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
217.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T114	1	11	30.777	LS	135	8	54.804	BT
218.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T115	1	12	2.015	LS	135	8	36.209	BT
219.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T116	1	12	2.052	LS	135	8	36.185	BT
220.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T117	1	11	3.378	LS	134	55	27.701	BT
221.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T118	1	10	44.147	LS	134	53	22.895	BT
222.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T119	1	9	45.889	LS	134	50	41.822	BT
223.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T120	1	7	45.881	LS	134	39	55.56	BT
224.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T121	1	6	56.134	LS	134	35	6.3	BT
225.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T122	1	6	22.509	LS	134	35	2.907	BT
226.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T123	1	7	13.796	LS	134	40	1.123	BT
227.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T124	1	9	7.597	LS	134	50	13.96	BT
228.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T125	1	8	20.847	LS	134	49	49.218	BT
229.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T126	1	6	34.366	LS	134	50	34.991	BT
230.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T127	1	6	47.742	LS	134	51	4.468	BT
231.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T128	1	8	20.106	LS	134	50	23.58	BT
232.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T129	1	9	16.775	LS	134	50	57.005	BT
233.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T130	1	10	12.432	LS	134	53	30.585	BT
234.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T131	1	10	31.086	LS	134	55	31.963	BT
235.	Alur Laut	Alur Pelayaran	T132	1	11	30.777	LS	135	8	54.804	BT
236.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	4	1.189	LS	135	19	17.696	BT
237.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	32.096	LS	135	19	1.518	BT
238.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	1.501	LS	135	20	42.64	BT
239.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	3.399	LS	135	22	41.339	BT
240.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	58.422	LS	135	27	21.325	BT
241.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	59.435	LS	135	29	36.811	BT
242.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	2	48.552	LS	135	33	3.987	BT
243.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	1	0.489	LS	135	36	23.279	BT
244.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	59	55.57	LS	135	37	4.357	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
245.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	58	53.72	LS	135	37	23.598	BT
246.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	56	0.491	LS	135	38	58.583	BT
247.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	16.25	LS	135	39	22.869	BT
248.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	28.51	LS	135	39	30.636	BT
249.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	4.072	LS	135	39	34.62	BT
250.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	53	11.72	LS	135	39	32.04	BT
251.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	49.88	LS	135	39	28.076	BT
252.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	31.3	LS	135	39	14.735	BT
253.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	31.19	LS	135	39	14.718	BT
254.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	4.69	LS	135	39	39.537	BT
255.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	18.75	LS	135	40	3.807	BT
256.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	18.76	LS	135	40	3.825	BT
257.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	34.34	LS	135	40	27.118	BT
258.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	53	10	LS	135	40	52.262	BT
259.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	53	57.1	LS	135	41	18.8	BT
260.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	27.09	LS	135	41	26.589	BT
261.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	46.02	LS	135	41	46.521	BT
262.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	57	4.056	LS	135	41	46.659	BT
263.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	58	53.6	LS	135	42	18.259	BT
264.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	7	6.557	LS	135	44	40.464	BT
265.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	9	51.347	LS	135	46	5.312	BT
266.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	31.78	LS	135	47	16.485	BT
267.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	13	11	LS	135	48	42.788	BT
268.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	43.65	LS	135	52	23.885	BT
269.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	8.178	LS	135	53	6.02	BT
270.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	0.624	LS	135	54	52.768	BT
271.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	21.37	LS	135	55	39.594	BT
272.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	8.448	LS	136	4	19.644	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
273.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	19	54.68	LS	136	5	13.428	BT
274.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	19	29.05	LS	136	5	45.309	BT
275.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	48.22	LS	136	6	10.834	BT
276.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	24.1	LS	136	6	25.916	BT
277.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	41.24	LS	136	6	35.838	BT
278.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	56.03	LS	136	6	30.759	BT
279.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	15.81	LS	136	6	33.132	BT
280.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	38.25	LS	136	6	55.59	BT
281.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	0.991	LS	136	7	47.481	BT
282.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	40.79	LS	136	8	30.747	BT
283.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	25.79	LS	136	8	80.603	BT
284.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	1.251	LS	136	8	16.539	BT
285.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	13	32.73	LS	136	8	20.582	BT
286.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	12	28.67	LS	136	8	44.164	BT
287.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	12	16.93	LS	136	8	51.226	BT
288.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	12	12.33	LS	136	8	54.041	BT
289.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	58.68	LS	136	8	58.339	BT
290.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	52.47	LS	136	8	58.644	BT
291.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	31.15	LS	136	9	25.574	BT
292.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	29.73	LS	136	9	26.473	BT
293.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	58.7	LS	136	9	37.692	BT
294.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	12	8.266	LS	136	9	38.73	BT
295.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	12	24.8	LS	136	9	39.59	BT
296.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	13	18.45	LS	136	9	31.296	BT
297.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	19.85	LS	136	9	14.607	BT
298.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	26.02	LS	136	9	16.001	BT
299.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	37.81	LS	136	9	16.25	BT
300.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	17.77	LS	136	9	27.797	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
301.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	49.37	LS	136	9	28.408	BT
302.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	12.43	LS	136	9	22.144	BT
303.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	37.6	LS	136	9	21.279	BT
304.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	19.23	LS	136	9	40.832	BT
305.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	35.88	LS	136	9	46.537	BT
306.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	21	48.31	LS	136	10	52.559	BT
307.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	22	57.7	LS	136	11	41.108	BT
308.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	24	13.34	LS	136	13	2.672	BT
309.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	27	17.44	LS	136	17	0.321	BT
310.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	29	6.709	LS	136	18	13.327	BT
311.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	30	58.14	LS	136	19	27.561	BT
312.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	31	41.42	LS	136	20	19.998	BT
313.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	32	27.85	LS	136	21	44.15	BT
314.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	33	27.63	LS	136	24	9.955	BT
315.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	33	43.52	LS	136	25	41.693	BT
316.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	33	38.03	LS	136	27	30.647	BT
317.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	35	54.76	LS	136	40	17.012	BT
318.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	36	21.67	LS	136	41	23.818	BT
319.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	36	34.83	LS	136	41	56.332	BT
320.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	37	9.142	LS	136	43	36.807	BT
321.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	37	45.25	LS	136	45	22.55	BT
322.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	39	5.143	LS	136	49	6.682	BT
323.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	39	19.59	LS	136	49	32.028	BT
324.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	40	37.11	LS	136	51	3.996	BT
325.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	42	44.9	LS	136	53	35.363	BT
326.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	43	14.43	LS	136	54	0.912	BT
327.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	45	30.67	LS	136	55	23.45	BT
328.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	45	50.01	LS	136	55	35.084	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
329.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	46	26.36	LS	136	55	47.171	BT
330.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	47	4.318	LS	136	55	51.102	BT
331.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	47	28.39	LS	136	55	48.441	BT
332.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	47	52.41	LS	136	55	41.09	BT
333.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	48	18.78	LS	136	55	26.846	BT
334.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	48	37.91	LS	136	55	12.204	BT
335.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	49	0.025	LS	136	54	49.497	BT
336.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	49	41.25	LS	136	54	23.577	BT
337.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	49	47.49	LS	136	54	17.577	BT
338.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	49	47.5	LS	136	54	17.57	BT
339.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	35.81	LS	136	53	30.929	BT
340.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	50.33	LS	136	53	20.283	BT
341.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	59.05	LS	136	53	9.966	BT
342.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	51	4.66	LS	136	52	59.692	BT
343.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	51	22.73	LS	136	52	35.098	BT
344.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	52	6.928	LS	136	51	46.488	BT
345.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	50.05	LS	136	47	47.952	BT
346.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	55	0.924	LS	136	47	19.991	BT
347.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	36.38	LS	136	33	56.091	BT
348.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	36.41	LS	136	33	55.895	BT
349.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	9.149	LS	136	30	54.477	BT
350.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	23.15	LS	136	24	55.233	BT
351.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	29.36	LS	136	24	12.311	BT
352.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	33.93	LS	136	23	14.557	BT
353.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	26.11	LS	136	21	12.951	BT
354.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	17.32	LS	136	20	34.114	BT
355.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	54.98	LS	136	19	42.668	BT
356.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	43.53	LS	136	19	16.549	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
357.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	12.97	LS	136	18	25.713	BT
358.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	0.705	LS	136	17	52.059	BT
359.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	44.27	LS	136	17	25.721	BT
360.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	56	45.19	LS	136	16	27.519	BT
361.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	22.34	LS	136	16	34.855	BT
362.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	4.43	LS	136	16	37.331	BT
363.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	23.62	LS	136	16	38.452	BT
364.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	35.26	LS	136	16	42.016	BT
365.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	17.89	LS	136	16	55.008	BT
366.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	1	56.273	LS	136	17	7.001	BT
367.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	2	16.899	LS	136	17	14.473	BT
368.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	2	33.198	LS	136	17	31.132	BT
369.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	9	22.916	LS	136	24	30.088	BT
370.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	14.15	LS	136	26	23.838	BT
371.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	14.39	LS	136	26	24.083	BT
372.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	14.64	LS	136	26	24.324	BT
373.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	35.93	LS	136	26	44.307	BT
374.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	10.13	LS	136	27	15.277	BT
375.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	31.4	LS	136	27	17.405	BT
376.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	36.74	LS	136	27	15.466	BT
377.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	20.67	LS	136	26	34.566	BT
378.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	6.685	LS	136	26	16.565	BT
379.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	0.608	LS	136	26	8.74	BT
380.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	34.38	LS	136	25	31.21	BT
381.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	21.74	LS	136	24	56.759	BT
382.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	8.839	LS	136	22	49.527	BT
383.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	18.25	LS	136	19	50.145	BT
384.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	20.73	LS	136	19	2.665	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
385.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	41.68	LS	136	16	21.272	BT
386.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	48.21	LS	136	15	41.036	BT
387.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	53.36	LS	136	15	9.29	BT
388.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	12	0.174	LS	136	14	27.31	BT
389.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	14	6.364	LS	136	11	4.511	BT
390.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	14	44.5	LS	136	10	24.38	BT
391.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	16	27.89	LS	136	8	23.261	BT
392.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	17	35.53	LS	136	7	38.851	BT
393.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	20	5.414	LS	136	4	42.589	BT
394.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	19	36.75	LS	136	4	26.171	BT
395.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	17	14.15	LS	136	7	14.228	BT
396.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	16	6.012	LS	136	7	59.076	BT
397.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	14	20.25	LS	136	10	2.784	BT
398.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	13	40.55	LS	136	10	44.647	BT
399.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	29.44	LS	136	14	15.68	BT
400.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	21.22	LS	136	15	4.138	BT
401.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	16.07	LS	136	15	35.882	BT
402.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	9.503	LS	136	16	16.371	BT
403.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	11	9.429	LS	136	16	16.878	BT
404.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	48.36	LS	136	18	59.136	BT
405.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	48.3	LS	136	18	59.75	BT
406.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	48.25	LS	136	19	0.366	BT
407.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	45.73	LS	136	19	48.461	BT
408.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	36.24	LS	136	22	50.325	BT
409.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	49.85	LS	136	25	3.903	BT
410.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	10	54.7	LS	136	25	17.521	BT
411.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	9	46.261	LS	136	24	7.532	BT
412.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	2	56.54	LS	136	17	8.574	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
413.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	2	34.112	LS	136	16	46.527	BT
414.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	2	3.259	LS	136	16	35.239	BT
415.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	24.26	LS	136	16	23.172	BT
416.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	44.85	LS	136	16	11.093	BT
417.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	29.36	LS	136	16	6.481	BT
418.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	6.336	LS	136	16	5.029	BT
419.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	26.31	LS	136	16	2.7	BT
420.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	56	29.96	LS	136	15	51.492	BT
421.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	56	15.5	LS	136	15	48.612	BT
422.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	55	38.6	LS	136	15	41.465	BT
423.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	57.99	LS	136	15	44.036	BT
424.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	20.82	LS	136	15	58.021	BT
425.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	57.37	LS	136	16	7.083	BT
426.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	41.29	LS	136	16	9.824	BT
427.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	35.29	LS	136	16	9.306	BT
428.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	28.89	LS	136	16	7.013	BT
429.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	28.94	LS	136	16	7.11	BT
430.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	28.94	LS	136	16	7.11	BT
431.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	28.94	LS	136	16	7.111	BT
432.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	1.033	LS	136	16	27.653	BT
433.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	31.96	LS	136	16	48.123	BT
434.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	50.03	LS	136	16	47.71	BT
435.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	53	57.64	LS	136	16	44.925	BT
436.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	22.21	LS	136	16	39.864	BT
437.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	37.12	LS	136	16	37.781	BT
438.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	55	9.283	LS	136	16	40.566	BT
439.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	56	0.759	LS	136	16	34.599	BT
440.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	18.96	LS	136	17	46.255	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
441.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	31.35	LS	136	18	6.264	BT
442.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	43.43	LS	136	18	39.5	BT
443.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	14.69	LS	136	19	31.63	BT
444.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	25.1	LS	136	19	55.528	BT
445.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	46.3	LS	136	20	44.184	BT
446.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	53.84	LS	136	21	17.616	BT
447.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	59	1.334	LS	136	23	14.431	BT
448.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	56.99	LS	136	24	8.726	BT
449.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	58	51.07	LS	136	24	49.647	BT
450.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	37.21	LS	136	30	48.18	BT
451.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	57	4.389	LS	136	33	50.084	BT
452.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	29.23	LS	136	47	12.413	BT
453.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	54	21.18	LS	136	47	32.789	BT
454.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	51	41.12	LS	136	51	26.702	BT
455.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	57.62	LS	136	52	14.471	BT
456.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	37.19	LS	136	52	42.242	BT
457.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	31.99	LS	136	52	51.806	BT
458.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	26.95	LS	136	52	57.666	BT
459.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	50	15.26	LS	136	53	5.766	BT
460.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	49	24.82	LS	136	53	54.356	BT
461.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	49	20.25	LS	136	53	58.76	BT
462.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	48	41.07	LS	136	54	23.112	BT
463.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	48	15.39	LS	136	54	48.812	BT
464.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	48	0.149	LS	136	55	0.287	BT
465.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	47	38.54	LS	136	55	11.77	BT
466.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	47	20.69	LS	136	55	16.967	BT
467.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	47	2.823	LS	136	55	18.735	BT
468.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	46	31.8	LS	136	55	15.223	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
469.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	46	4.16	LS	136	55	5.839	BT
470.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	45	47.61	LS	136	54	55.82	BT
471.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	43	33.54	LS	136	53	34.654	BT
472.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	43	9.005	LS	136	53	13.574	BT
473.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	41	2.055	LS	136	50	43.202	BT
474.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	39	46.55	LS	136	49	13.768	BT
475.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	39	34.92	LS	136	48	53.452	BT
476.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	38	16.04	LS	136	45	12.054	BT
477.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	37	39.97	LS	136	43	26.411	BT
478.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	37	5.208	LS	136	41	44.678	BT
479.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	36	51.88	LS	136	41	11.748	BT
480.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	36	26.22	LS	136	40	8.338	BT
481.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	34	10.65	LS	136	27	29.276	BT
482.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	34	16.12	LS	136	25	39.684	BT
483.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	33	58.9	LS	136	24	0.615	BT
484.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	32	57.27	LS	136	21	30.237	BT
485.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	32	8.168	LS	136	20	1.43	BT
486.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	31	19.93	LS	136	19	3.295	BT
487.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	29	24.83	LS	136	17	46.457	BT
488.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	27	39.72	LS	136	16	36.437	BT
489.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	24	38.71	LS	136	12	42.388	BT
490.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	23	18.96	LS	136	11	16.488	BT
491.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	22	2.687	LS	136	10	23.358	BT
492.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	46.5	LS	136	9	15.959	BT
493.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	30.71	LS	136	9	10.547	BT
494.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	43.48	LS	136	8	48.993	BT
495.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	7.068	LS	136	8	50.12	BT
496.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	45.47	LS	136	8	56.118	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
497.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	23.08	LS	136	8	55.735	BT
498.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	44.91	LS	136	8	44.607	BT
499.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	26.71	LS	136	8	43.661	BT
500.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	26.49	LS	136	8	42.393	BT
501.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	35.87	LS	136	8	39.361	BT
502.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	14	56.22	LS	136	8	32.543	BT
503.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	15	24.99	LS	136	8	90.565	BT
504.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	0.837	LS	136	7	19.37	BT
505.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	25.59	LS	136	7	40.52	BT
506.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	16	55.02	LS	136	7	30.143	BT
507.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	42.9	LS	136	7	80.384	BT
508.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	36.69	LS	136	6	55.994	BT
509.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	19	5.568	LS	136	6	38.213	BT
510.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	19	50.51	LS	136	6	90.931	BT
511.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	24.03	LS	136	5	28.264	BT
512.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	40.8	LS	136	4	24.074	BT
513.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	53.62	LS	135	55	32.882	BT
514.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	20	27.34	LS	135	54	33.737	BT
515.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	18	26.68	LS	135	52	39.185	BT
516.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	17	3.376	LS	135	51	57.837	BT
517.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	13	33.53	LS	135	48	19.417	BT
518.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	11	51.86	LS	135	46	50.998	BT
519.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	10	8.336	LS	135	45	37.672	BT
520.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	7	18.688	LS	135	44	10.364	BT
521.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	59	2.684	LS	135	41	47.198	BT
522.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	57	8.497	LS	135	41	14.454	BT
523.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	50.2	LS	135	41	14.315	BT
524.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	35.16	LS	135	40	55.254	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
525.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	9.472	LS	135	40	48.724	BT
526.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	53	26.79	LS	135	40	24.542	BT
527.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	58.02	LS	135	40	4.491	BT
528.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	56.49	LS	135	40	2.154	BT
529.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	53	8.032	LS	135	40	4.209	BT
530.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	5.989	LS	135	40	6.999	BT
531.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	33.78	LS	135	40	2.554	BT
532.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	27.23	LS	135	39	53.572	BT
533.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	56	16.23	LS	135	39	26.891	BT
534.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	59	6.308	LS	135	37	53.516	BT
535.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	0	9.371	LS	135	37	33.81	BT
536.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	1	24.812	LS	135	36	45.583	BT
537.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	18.613	LS	135	33	16.547	BT
538.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	4	31.915	LS	135	29	41.187	BT
539.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	4	30.866	LS	135	27	17.894	BT
540.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	35.852	LS	135	22	38.075	BT
541.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	3	33.854	LS	135	20	47.693	BT
542.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	4	1.189	LS	135	19	17.696	BT
543.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.69	LS	135	42	41.46	BT
544.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.67	LS	135	42	41.79	BT
545.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.61	LS	135	42	42.574	BT
546.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.59	LS	135	42	42.966	BT
547.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.38	LS	135	42	46.101	BT
548.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.35	LS	135	42	46.493	BT
549.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.3	LS	135	42	47.277	BT
550.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.28	LS	135	42	47.669	BT
551.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.19	LS	135	42	49.237	BT
552.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.16	LS	135	42	49.63	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
553.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.12	LS	135	42	50.414	BT
554.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.1	LS	135	42	50.806	BT
555.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.92	LS	135	42	53.943	BT
556.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.9	LS	135	42	54.334	BT
557.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.86	LS	135	42	55.118	BT
558.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.84	LS	135	42	55.511	BT
559.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.76	LS	135	42	57.08	BT
560.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.74	LS	135	42	57.472	BT
561.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.71	LS	135	42	58.257	BT
562.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.69	LS	135	42	58.649	BT
563.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.55	LS	135	43	1.787	BT
564.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.54	LS	135	43	2.18	BT
565.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.5	LS	135	43	2.964	BT
566.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.49	LS	135	43	3.357	BT
567.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.43	LS	135	43	4.926	BT
568.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.42	LS	135	43	5.03	BT
569.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.41	LS	135	43	5.318	BT
570.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.39	LS	135	43	6.103	BT
571.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.37	LS	135	43	6.496	BT
572.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.27	LS	135	43	9.636	BT
573.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.26	LS	135	43	10.028	BT
574.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.23	LS	135	43	10.813	BT
575.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.22	LS	135	43	11.206	BT
576.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.18	LS	135	43	12.777	BT
577.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.17	LS	135	43	13.169	BT
578.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.15	LS	135	43	13.954	BT
579.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.14	LS	135	43	14.347	BT
580.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.07	LS	135	43	17.488	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
581.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.06	LS	135	43	17.88	BT
582.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.05	LS	135	43	18.665	BT
583.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.04	LS	135	43	19.058	BT
584.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.01	LS	135	43	20.629	BT
585.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37.01	LS	135	43	21.021	BT
586.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	37	LS	135	43	21.806	BT
587.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.99	LS	135	43	22.199	BT
588.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.97	LS	135	43	24.187	BT
589.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.96	LS	135	43	24.911	BT
590.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.95	LS	135	43	25.304	BT
591.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.93	LS	135	43	26.089	BT
592.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.93	LS	135	43	26.482	BT
593.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	36.9	LS	135	43	27.895	BT
594.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	43	29.66	LS	135	42	37.853	BT
595.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	33.96	LS	135	38	58.052	BT
596.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	58.02	LS	135	38	36.275	BT
597.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	58.39	LS	135	38	36.175	BT
598.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	58.76	LS	135	38	36.065	BT
599.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	59.12	LS	135	38	35.948	BT
600.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	59.48	LS	135	38	35.822	BT
601.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	59.82	LS	135	38	35.697	BT
602.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	0.15	LS	135	38	35.566	BT
603.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	0.477	LS	135	38	35.427	BT
604.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	0.8	LS	135	38	35.281	BT
605.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	1.12	LS	135	38	35.128	BT
606.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	1.437	LS	135	38	34.969	BT
607.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	1.75	LS	135	38	34.802	BT
608.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	2.06	LS	135	38	34.629	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
609.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	2.365	LS	135	38	34.449	BT
610.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	2.667	LS	135	38	34.263	BT
611.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	2.964	LS	135	38	34.07	BT
612.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	3.258	LS	135	38	33.87	BT
613.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	3.546	LS	135	38	33.664	BT
614.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	3.83	LS	135	38	33.452	BT
615.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	4.11	LS	135	38	33.234	BT
616.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	4.384	LS	135	38	33.01	BT
617.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	4.829	LS	135	38	32.626	BT
618.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	50	32.12	LS	135	37	14.25	BT
619.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	54	3.203	LS	135	34	17.469	BT
620.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	25.695	LS	135	30	47.937	BT
621.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	4	59.369	LS	135	30	11.253	BT
622.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	4	59.817	LS	135	30	11.14	BT
623.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	0.261	LS	135	30	11.013	BT
624.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	0.702	LS	135	30	10.875	BT
625.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	1.138	LS	135	30	10.724	BT
626.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	1.471	LS	135	30	10.599	BT
627.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	1.8	LS	135	30	10.468	BT
628.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	2.127	LS	135	30	10.329	BT
629.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	2.45	LS	135	30	10.183	BT
630.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	2.77	LS	135	30	10.03	BT
631.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	3.087	LS	135	30	9.871	BT
632.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	3.4	LS	135	30	9.704	BT
633.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	3.71	LS	135	30	9.531	BT
634.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	3.906	LS	135	30	9.416	BT
635.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	33.344	LS	135	29	51.96	BT
636.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	57.722	LS	135	29	36.587	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
637.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	8	50.092	LS	135	29	24.262	BT
638.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	12	11.67	LS	135	29	9.153	BT
639.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	15	0.324	LS	135	28	56.518	BT
640.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	15	52.68	LS	135	28	52.366	BT
641.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	17	26.87	LS	135	28	8.707	BT
642.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	18	49.39	LS	135	28	8.409	BT
643.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	33.22	LS	135	28	13.132	BT
644.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	43.87	LS	135	28	13.618	BT
645.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	22	12.33	LS	135	28	28.028	BT
646.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	22	17.05	LS	135	28	28.796	BT
647.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	22	27.58	LS	135	27	54.175	BT
648.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	22	25.4	LS	135	27	52.519	BT
649.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	21	58.14	LS	135	27	32.134	BT
650.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	21	11.93	LS	135	27	15.96	BT
651.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	49.18	LS	135	26	59.917	BT
652.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	17	24.29	LS	135	25	5.925	BT
653.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	16	58.13	LS	135	24	42.202	BT
654.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	15	39.43	LS	135	23	31.101	BT
655.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	12	17.75	LS	135	21	49.859	BT
656.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	11	9.233	LS	135	21	15.597	BT
657.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	8	52.187	LS	135	20	23.353	BT
658.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	55.316	LS	135	18	25.248	BT
659.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	4	33.041	LS	135	17	10.5	BT
660.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	0	51.447	LS	135	14	43.428	BT
661.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	58	29.57	LS	135	14	0.616	BT
662.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	55	49.54	LS	135	12	27.334	BT
663.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	49	45.28	LS	135	8	55.014	BT
664.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	50	18.84	LS	135	9	52.106	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
665.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	55	33.08	LS	135	12	55.271	BT
666.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	58	16.45	LS	135	14	30.378	BT
667.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	0	37.539	LS	135	15	12.905	BT
668.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	4	16.562	LS	135	17	38.455	BT
669.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	36.14	LS	135	18	51.659	BT
670.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	8	34.008	LS	135	20	50.677	BT
671.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	10	56.81	LS	135	21	45.549	BT
672.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	12	3.108	LS	135	22	18.784	BT
673.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	15	21.07	LS	135	23	58.032	BT
674.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	16	36.2	LS	135	25	6.143	BT
675.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	17	4.802	LS	135	25	32.002	BT
676.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	31.07	LS	135	27	26.85	BT
677.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	52.94	LS	135	27	42.271	BT
678.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	47.25	LS	135	27	41.372	BT
679.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	20	34.71	LS	135	27	40.772	BT
680.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	18	50.47	LS	135	27	36.031	BT
681.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	18	50.1	LS	135	27	36.018	BT
682.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	18	49.73	LS	135	27	36.014	BT
683.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	18	49.67	LS	135	27	36.014	BT
684.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	17	19	LS	135	27	36.88	BT
685.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	15	44.6	LS	135	28	20.709	BT
686.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	14	57.87	LS	135	28	24.218	BT
687.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	12	9.228	LS	135	28	36.855	BT
688.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	8	47.365	LS	135	28	51.987	BT
689.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	8	46.804	LS	135	28	52.038	BT
690.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	53.577	LS	135	29	4.459	BT
691.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	53.054	LS	135	29	4.525	BT
692.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	52.534	LS	135	29	4.607	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
693.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	6	52.428	LS	135	29	4.626	BT
694.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	24.596	LS	135	29	20.629	BT
695.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	24.26	LS	135	29	20.693	BT
696.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	23.926	LS	135	29	20.765	BT
697.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	23.594	LS	135	29	20.844	BT
698.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	23.263	LS	135	29	20.929	BT
699.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	22.934	LS	135	29	21.022	BT
700.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	22.607	LS	135	29	21.121	BT
701.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	22.283	LS	135	29	21.227	BT
702.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	21.961	LS	135	29	21.34	BT
703.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	21.628	LS	135	29	21.465	BT
704.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	21.299	LS	135	29	21.596	BT
705.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	20.972	LS	135	29	21.735	BT
706.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	20.649	LS	135	29	21.881	BT
707.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	20.328	LS	135	29	22.034	BT
708.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	20.012	LS	135	29	22.193	BT
709.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	19.698	LS	135	29	22.36	BT
710.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	19.389	LS	135	29	22.533	BT
711.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	5	19.193	LS	135	29	22.648	BT
712.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	4	49.364	LS	135	29	40.336	BT
713.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	16.818	LS	135	30	16.752	BT
714.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	16.37	LS	135	30	16.866	BT
715.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	15.925	LS	135	30	16.992	BT
716.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	15.485	LS	135	30	17.13	BT
717.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	15.049	LS	135	30	17.281	BT
718.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	14.684	LS	135	30	17.419	BT
719.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	3	2	14.322	LS	135	30	17.564	BT
720.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	48.32	LS	135	33	48.562	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
721.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	47.85	LS	135	33	48.767	BT
722.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	47.38	LS	135	33	48.988	BT
723.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	46.92	LS	135	33	49.223	BT
724.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	46.47	LS	135	33	49.472	BT
725.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	46.17	LS	135	33	49.652	BT
726.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	45.87	LS	135	33	49.839	BT
727.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	45.57	LS	135	33	50.032	BT
728.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	45.28	LS	135	33	50.231	BT
729.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	44.99	LS	135	33	50.437	BT
730.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	44.7	LS	135	33	50.649	BT
731.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	44.42	LS	135	33	50.867	BT
732.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	44.15	LS	135	33	51.091	BT
733.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	53	44.13	LS	135	33	51.109	BT
734.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	50	10.94	LS	135	36	49.662	BT
735.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	50	10.51	LS	135	36	50.029	BT
736.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	48	45.96	LS	135	38	5.94	BT
737.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	21.9	LS	135	38	27.72	BT
738.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	21.53	LS	135	38	27.821	BT
739.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	21.16	LS	135	38	27.93	BT
740.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	20.8	LS	135	38	28.047	BT
741.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	20.43	LS	135	38	28.174	BT
742.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	20.1	LS	135	38	28.298	BT
743.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	19.77	LS	135	38	28.43	BT
744.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	19.44	LS	135	38	28.568	BT
745.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	19.12	LS	135	38	28.714	BT
746.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	18.8	LS	135	38	28.867	BT
747.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	18.48	LS	135	38	29.026	BT
748.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	18.17	LS	135	38	29.193	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
749.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	17.86	LS	135	38	29.366	BT
750.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	17.56	LS	135	38	29.546	BT
751.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	17.25	LS	135	38	29.733	BT
752.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	16.96	LS	135	38	29.926	BT
753.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	16.66	LS	135	38	30.125	BT
754.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	16.38	LS	135	38	30.331	BT
755.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	16.09	LS	135	38	30.543	BT
756.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	15.81	LS	135	38	30.761	BT
757.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	15.54	LS	135	38	30.985	BT
758.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	47	15.08	LS	135	38	31.382	BT
759.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	43	7.667	LS	135	42	13.988	BT
760.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	43	7.353	LS	135	42	14.278	BT
761.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	2	42	38.69	LS	135	42	41.46	BT
762.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	31.34	LS	134	38	36.269	BT
763.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	3.276	LS	134	38	56.816	BT
764.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	11.77	LS	134	39	27.461	BT
765.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	46.07	LS	134	41	46.559	BT
766.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	51	40.34	LS	134	43	31.274	BT
767.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	26.28	LS	134	47	57.738	BT
768.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	26.5	LS	134	47	58.079	BT
769.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	3.279	LS	134	48	53.948	BT
770.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	3.541	LS	134	48	54.334	BT
771.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	3.814	LS	134	48	54.712	BT
772.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	21.09	LS	134	49	17.924	BT
773.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	24.26	LS	134	49	24.358	BT
774.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	33.59	LS	134	49	43.27	BT
775.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	19.8	LS	134	49	41.833	BT
776.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	4.493	LS	134	49	44.506	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
777.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	0.733	LS	134	49	45.338	BT
778.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	42.36	LS	134	49	56.939	BT
779.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	22.57	LS	134	50	25.274	BT
780.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	11.51	LS	134	51	2.412	BT
781.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	4.097	LS	134	52	56.287	BT
782.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	20.91	LS	134	54	54.23	BT
783.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	26.57	LS	134	56	6.519	BT
784.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	54.64	LS	134	58	23.571	BT
785.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	1.117	LS	134	59	18.467	BT
786.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	5.348	LS	134	59	53.73	BT
787.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	50.3	LS	135	2	14.673	BT
788.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	58	19.62	LS	135	7	20.853	BT
789.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	0	44.31	LS	135	11	3.981	BT
790.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	1	24.344	LS	135	11	7.548	BT
791.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	1	1	24.355	LS	135	11	7.549	BT
792.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	58	48.15	LS	135	6	47.255	BT
793.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	56	20.51	LS	135	2	20.474	BT
794.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	37.26	LS	134	59	46.978	BT
795.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	33.45	LS	134	59	14.701	BT
796.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	26.76	LS	134	58	18.203	BT
797.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	58.87	LS	134	56	2.24	BT
798.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	53.29	LS	134	54	50.697	BT
799.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	36.71	LS	134	52	55.089	BT
800.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	43.68	LS	134	51	8.023	BT
801.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	51.93	LS	134	50	39.708	BT
802.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	5.025	LS	134	50	20.583	BT
803.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	11.95	LS	134	50	16.019	BT
804.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	20.76	LS	134	50	14.35	BT

No	Kawasan	ZONA	NOTASI	Lintang				Bujur			
				Derajat	Menit	Detik	Lintang	Derajat	Menit	Detik	Bujur
805.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	36.94	LS	134	50	16.216	BT
806.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	56	6.402	LS	134	50	23.867	BT
807.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	56	27.3	LS	134	49	58.083	BT
808.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	56	4.474	LS	134	49	32.362	BT
809.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	53.5	LS	134	49	10.119	BT
810.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	48.92	LS	134	49	1.008	BT
811.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	55	30.27	LS	134	48	35.857	BT
812.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	54	53.86	LS	134	47	40.548	BT
813.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	52	8.805	LS	134	43	15.545	BT
814.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	51	16.72	LS	134	41	35.321	BT
815.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	43.34	LS	134	39	19.556	BT
816.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	43.22	LS	134	39	19.096	BT
817.	Alur Laut	Kabel Bawah Laut	T3	0	50	31.34	LS	134	38	36.269	BT

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANGRENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGISNASIONAL BIAK

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
I	**DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**								
	Susunan pusat pertumbuhan kelautan								
1	Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
	a. Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya	Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Swasta dan BUMN				
	b. Sentra Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat KPE Saereri	Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Supiori	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Swasta dan BUMN				
2	Pusat industri kelautan								
	Sentra Industri Maritim	Kabupaten Biak	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen ATR, Kemen PUPR, Kemendagri,				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
					Kemen Perindustrian, BPPT, Swasta dan BUMN				
II	**Sistem jaringan prasarana dan sarana laut**								
	1. Peningkatan peran status pelabuhan laut	Kabupaten Biak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR				
	2. Penataan sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan	Kabupaten Biak, Kabupaten Waropen	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP, Kemenhub	Kemen.PUPR				
	3. Peningkatan peran pelabuhan perikanan	Kabupaten Biak, Kabupaten Waropen	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP, Kemenhub	Kemen.PUPR				
I	**PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT**								
A	**KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**								
1	Zona Pariwisata								
	a. Pengembangan akses kawasan wisata alam	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen PUPR, Kemen. Pariwisata				
	b. Penyediaan sarana dan prasarana wisata	U1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	PUPR	Kemen. Pariwisata				
	c. Pembinaan masyarakat adat untuk pengembangan destinasi	U1	APBN dan sumber pendanaan lain	Kementerian Pariwisata					

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
	wisata berbasis budaya dan potensi alam		yang sah						
2	Zona Permukiman								
	a. Penataan kawasan pemukiman masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Daerah Tertinggal				
	b. Pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan kawasan	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ATR/BPN	Kementerian Daerah Tertinggal				
	c. Mengalokasikan ruang untuk pemukiman masyarakat hukum adat dan atau masyarakat lokal	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Daerah Tertinggal				
	d. Peningkatan dan pengembangan insfrastruktur di pemukiman bahari	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen.PUPR	KKP				
	e. Sosialisasi tentang sanitasi dan perbaikan fasilitas kesehatan lainnya	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup	KKP, Kementerian Kesehatan				
	f. Pemberian kemudahan perijinan bagi masyarakat lokal dan/atau nelayan dalam mengelola pesisir dan laut	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Daerah Tertinggal				
	g. Penyusunan instrumen pengendalian kota-kota pesisir	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup	KKP, Kementerian Kesehatan				
	h. Peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan	U2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup	KKP, Kementerian Kesehatan				
3	Zona Pelabuhan								
	a. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan nasional	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, KemenPUPR, TNI				
	b. pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan nasional	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain	Kemenhub	KKP, TNI				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
			yang sah						
	c. penataan dan pengelolaan jalur pelayaran	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, Pushidrosal				
	d. pengembangan dan pengelolaan pelabuhan komersial internasional	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	BUMN, TNI				
	e. pengembangan dan peningkatan jasa-jasa kelautan	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, TNI				
4	Zona Pelabuhan Perikanan								
	a. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Pushidrosal				
	b. Penataan kawasan disekitar pelabuhan perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Pushidrosal				
	c. Penataan dan pengelolaan sistem perparkiran kapal perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Pushidrosal				
	d. Revitalisasi dan Penataan prasarana dan sarana di wilayah perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Pushidrosal				
5	Zona Pertambangan								
	a. Optimalisasi pemanfaatan Wilayah Kerja	U5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian ESDM	KKP, masyarakat				
	b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Kerja	U5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian ESDM	KKP, masyarakat				
6	Zona Industri								
	a. penyediaan ruang pengolahan hasil kelautan dan perikanan	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain	Kemenperin, KKP	Kemenkomaritim, Kemen.				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
	(unit usaha pengolahan hasil perikanan)		yang sah		PUPR, Swasta				
	b. pelatihan nilai tambah industri kelautan dan perikanan	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomaritim, Kemen. PUPR, Swasta				
	c. pengembangan industri kelautan dan perikanan	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomaritim, Kemen. PUPR, Swasta				
	d. pengembangan industri maritim	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomaritim, Kemen. PUPR, Swasta				
	e. pengembangan kawasan penunjang industri terpadu Dawai Serui, Kabupaten Yapen dan Kawasan industry Urfu, Kabupaten Biak, Kawasan Industri Barapesi Waropen	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomaritim, Kemen. PUPR, Swasta				
	f. pengembangan perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman nelayan modern secara terintegrasi	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomaritim, Kemen. PUPR, Swasta				
7	Zona Bandara								
	a. Pengembangan area bandar udara	U12	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan					
	b. Pengembangan fasilitas dan pelayanan bandar udara	U12	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan					
8	Zona Energi								
	a. Peningkatan jaringan dan kapasitas penyediaan listrik dan gas	U14	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian ESDM	BUMN, swasta				
	b. Penyediaan ruang untuk peningkatan kapasitas PLTU dan PLTGU enyediaan ruang	U14	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian ESDM	KKP				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
	untuk peningkatan kapasitas PLTU dan PLTGU								
9	Zona Pertahanan dan Keamanan								
	1. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk Daerah Ranjau di perairan Kabupaten Biak	U18	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	2. Pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk Daerah latihan militer di Kabupaten Biak	U18	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	3. Pengajuan Daerah Latihan Baru KOARMADA III di perairan Kabupaten Biak	U18	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	4. kerjasama dengan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan di laut	U18	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	5. Pembersihan ranjau di Kabupaten Biak	U18	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
B	**ALUR LAUT**								
	Alur Pelayaran								
	1. Penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai kepentingannya	T1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP				
	2. Peningkatan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan	T1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP				
	Alur Pipa Bawah Laut								
	1. Perancanaan jalur dan konstruksi jaringan pipa bawah laut	T2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, KemenESDM TNI				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	I (2020- 2024)	II (2025 – 2029)	III (2030 – 2034)	IV (2035 – 2039)
	2. Pengawasan, pengamanan, dan/atau perawatan pipa	T2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, emenESDM, TNI				
	Alur Kabel Bawah Laut								
	1. penyediaan ruang untuk kabel telekomunikasi	T3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Swasta				
	2. penataan jalur kabel telekomunikasi	T3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Swasta				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO